

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI, INFLASI DAN UPAH MINIMUM
PROVINSI TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI
PULAU SULAWESI PERIODE 2010-2019**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**ARMAN ARIFIN
155020101111064**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS PENGARUH INVESTASI, INFLASI DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PULAU SULAWESI PERIODE 2010-2019

Yang disusun oleh:

Nama : Arman Arifin
NIM : 155020101111064
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai persyaratan ujian skripsi yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Mei 2020

Malang, 27 Mei 2020

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Agus Suman, SE., DEA.

NIP. 196006151987011001

Analisis Pengaruh Investasi, Inflasi dan Upah Minimum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Sulawesi Periode 2010-2019

Arman Arifin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: armanarifin27@gmail.com

Pembimbing:

Prof. Dr. Agus Suman, SE., DEA.

Email : agussuman@ub.ac.id

ABSTRAK

Sebagai Negara kepulauan, pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi persoalan yang cukup serius yang dialami Indonesia. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk memakmurkan penduduk daerah atau negara dengan melihat peningkatan output atau dengan melihat peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki persoalan yang cukup kompleks dari bidang makroekonomi baik dari segi penyerapan tenaga kerja, modal yang terbatas, inflasi dan pemberian upah minimum yang berdasarkan kehidupan layak. Peningkatan beberapa variabel makroekonomi di pulau Sulawesi seperti investasi, inflasi dan upah minimum provinsi harapannya dapat mempengaruhi peningkatan PDRB sehingga perekonomian di pulau Sulawesi dapat meningkat. Dengan meningkatnya variabel makroekonomi tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, inflasi dan upah minimum provinsi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Pulau Sulawesi Periode 2010-2019. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis data panel dengan menggunakan program Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat PDRB di pulau Sulawesi. Artinya dengan peningkatan inflasi menyebabkan penurunan PDRB di pulau Sulawesi. Investasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di pulau Sulawesi dan juga dalam penelitian ini tidak melibatkan investasi asing yang dari segi jumlah proyek dan nilai investasi lebih tinggi dibanding penanaman modal dalam negeri. Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Hal ini disebabkan karena dengan peningkatan upah maka perusahaan akan melakukan efisiensi tenaga kerja.

Kata Kunci : *Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Inflasi Dan Upah Minimum Provinsi*

A. PENDAHULUAN

Setiap Negara melakukan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemakmuran bangsanya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penilain keberhasilan pembangunan suatu negara.

Pengejaran pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral bagi kehidupan ekonomi semua negara saat ini (Todaro, 2000). Perencanaan perekonomian sangat diperlukan karena sebagai arah bagi proses pembangunan dan juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan sama halnya sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk domestik regional bruto (PDRB) di tingkat daerah. Witjaksono (2009) berpendapat bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk memakmurkan penduduk daerah atau Negara. Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumberdaya yang ada.



Gambar 1. Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap PDB Nasional Tahun 2019

Melihat kondisi pulau Sulawesi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi sehingga harapannya dengan semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi kontribusi terhadap PDB nasional semakin tinggi karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menandakan bahwa kondisi perekonomian pulau tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, namun kontribusi terhadap PDB nasional masih sangat rendah dibandingkan dengan pulau yang ada di Indonesia yaitu sebesar 6.43% dan jika dibandingkan dengan pulau Jawa dengan pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5.56% kontribusi terhadap PDB nasional terbesar di Indonesia yaitu 59.15% di tahun 2019

Pulau Sulawesi sebagai pulau memiliki potensi yang cukup besar baik dari segi pariwisata, industry, perkebunan dan lain-lain menjadikannya sebagai target investasi cukup menjanjikan. Menurut Jhingan (1996) investasi merupakan sebuah solusi bagi Negara berkembang ataupun keterbelakangan untuk keluar dari keterpurukan ekonomi. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Nurkse (1964) yang menyebutkan bahwa

kemiskinan suatu Negara dapat digunting dengan investasi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Pulau Sulawesi Tahun 2010-2019 (Miliar Rupiah)

Provinsi	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sulut	95.8	331.6	678.5	66.8	83	270.6	5069.6	1488.2	4.32012	7410.1
Sulsel	3212.3	3986.3	2318.9	921	4949.6	9215.327	3334.6	1969.4	3.257876	2640.3
Sulbar	840	218.6	228.6	685.1	690.1	1103.796	84.1	660.2	3114.2	941.1
Sultra	19.2	59	907.3	1261.6	1249.9	2015.402	1794.2	3148.7	1603.4	3645.4
Sulteng	153.6	2620.2	602.8	605.3	95.8	968.4	1081.2	1929.7	8448.9	3080.3
Gorontalo	16.7	11.8	164.9	84.4	45.1	94.306	2202.5	888.4	2666.7	642.7

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020.

Dapat dilihat bahwa investasi di pulau Sulawesi terpusat di satu provinsi saja yaitu provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menyebabkan tidak meratanya pembangunan, penyerapan tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur dan lainnya lebih memadai di provinsi tersebut. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa investasi di pulau Sulawesi bersifat fluktuatif sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel 2. Inflasi Pulau Sulawesi (%)

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi										
Sulawesi Utara	6.28	0.67	6.04	8.12	9.67	5.56	0.35	2.44	3.83	3.52
Sulawesi Selatan	6.56	2.87	4.41	6.22	8.61	4.48	2.94	4.44	3.5	3.57
Sulawesi Barat	5.12	4.91	3.28	5.91	7.89	5.37	2.23	3.79	1.80	0,76
Sulawesi Tenggara	3.87	5.09	5.25	5.92	7.40	1.64	3.07	2.96	2.55	3.71
Sulawesi Tengah	6.4	4.47	5.87	7.57	8.85	4.17	1.49	4.33	6.46	5.71
Gorontalo	7.43	4.08	5.31	5.84	6.14	4.3	1.3	4.34	2.15	3.37

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan hasil publikasi Badan Pusat Statistic inflasi yang terjadi di pulau Sulawesi meskipun mengalami tren yang fluktuatif namun inflasi di pulau Sulawesi melampaui inflasi nasional dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi di provinsi Sulawesi Utara dengan tingkat inflasi sebesar 9.67% pada tahun 2014. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan indeks pada semua kelompok komoditas sehingga tidak ada kelompok yang memberikan sumbangan deflasi. Sumbangan inflasi terbesar terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 2.0136 persen (BPS 2015). Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan investor untuk berfikir ulang untuk menanamkan modalnya karena tingkat inflasi tinggi menyebabkan ketidakpastian keadaan ekonomi.

Tabel 3. Upah Minimum Provinsi Pulau Sulawesi

Tahun/Provinsi	Sulut	Sulsel	Sulbar	Sultra	Sulteng	Gorontalo
2010	1000000	1000000	944200	860000	777500	710000
2011	1050000	1100000	1006000	930000	827500	762500
2012	1250000	1200000	1127000	1032300	885000	837500
2013	1550000	1440000	1165000	1125207	995000	1175000
2014	1900000	1800000	1400000	1400000	1250000	1325000
2015	2150000	2000000	1655500	1652000	1500000	1600000
2016	2400000	2250000	1864000	1850000	1670000	1875000
2017	2598000	2435625	2017780	2002625	1807775	2030000
2018	2824286	2647767	2193530	2177052	1965232	2206813
2019	3051076	2860382	2369670	2351870	2123040	2384020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Penetapan upah tenaga kerja ditetapkan berdasarkan skill atau keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tersebut. Sedangkan dalam realita di lapangan terdapat tenaga kerja dengan kualifikasi tenaga kerja dengan keterampilan rendah (*low skilled*) dan keterampilan tinggi (*hight skilled*). Berdasarkan hasil publikasi Badan Pusat Statistik upah minimum provinsi di pulau Sulawesi mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama periode penelian. Tercatat upah tertinggi di tahun 2019 terdapat provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar Rp 3.051.076. Upah minimum yang ditetapkan memiliki pengaruh terhadap proses produksi, karena dengan semaki tingginya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka perusahaan akan melakukan efisiensi tenaga kerja karena upah tidak bersifat elastis pada permintaan tenaga kerja yang artinya berdampak pada nilai PDRB.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Para ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa terdapat unsur pokok dalam pertumbuhan ekonomi yaitu modal, jumlah penduduk, luas tanah dan kekayaan sumber alam, tingkat teknologi yang digunakan serta jumlah stok barang modal. Dari unsur tersebut para ahli ekonomi menitik beratkan pada jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi kiasiik dapat dilihat ketika produksi marjinal meningkat daripada pendapatan perkapita disebabkan oleh kekurangan penduduk. Hal tersebut juga berlaku kebalikannya ketika jumlah penduduk meningkat maka produk hasil marjinal akan mengalami penurunan. Sehingga pendapatan nasional dan pendapatan perkapita pertumbuhannya semakin lambat.

Produk Domestik Regional Bruto

Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun daerah dapat dilihat dari nilai PDRB untuk suatu daerah dan PDB untuk Negara. PDB adalah pendapatan dan keseluruhan total nasional dari barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. PDB mencerminkan keadaan ekonomi suatu Negara sedangkan PDRB mencerminkan keadaan atau kondisi perekonomian suatu daerah atau regional tertentu.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor produksi. Peningkatan PDRB di suatu daerah tertentu menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pula, pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menarik bagi para investor-investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah atau Negara, peningkatan investor akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Hubungan Investasi Terhadap PDRB

Menurut Todaro (1981) pembangunan ekonomi suatu negara mempunyai beberapa syarat umum, yang pertama adalah akumulasi modal, modal yang dimaksud dalam hal ini adalah tanah, sumberdaya manusia dan peralatan fisik. Kedua, pertumbuhan penduduk yang dibarengi oleh kemampuan individu dalam skill maupun hardskill. Ketiga adalah kemajuan teknologi. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan keterampilan bagi individu atau dengan kata lain tenaga kerja tersebut dapat tumbuh menjadi tenaga kerja yang terampil dan ahli yang dapat memperlancar kegiatan produktif. Menurut Sukirno (2010) pertumbuhan ekonomi akan meningkat ketika investasi dilakukan terus menerus oleh masyarakat sehingga akan memperluas peluang kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan pada akhirnya taraf hidup masyarakat meningkat.

Hubungan Inflasi Terhadap PDRB

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus menerus (Boediono, 1981). Dapat dikatakan sebagai inflasi ketika terjadi kenaikan harga barang secara meluas sehingga mengakibatkan sebagian besar dari harga barang-barang lain ikut naik. Dengan kenaikan harga barang-barang atau jasa tersebut maka seseorang akan enggan membelanjakan uangnya karena nilai mata uang jatuh sehingga roda perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik. Kenaikan inflasi di suatu daerah akan menyebabkan penurunan investasi yang pada akhirnya berakibat pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan ikut melemah.

Hubungan Upah Minimum Provinsi Terhadap PDRB

Menurut teori klasik permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh upah riil. Hal tersebut hanya dapat tercapai ketika permintaan tenaga kerja tersebut bersifat homogen. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan permintaan tenaga kerja bersifat sama atau setara tidak dibedakan dengan tenaga kerja yang memiliki tingkat kemampuan tinggi dan tingkat kemampuan rendah (*high skill and low skill*), sehubungan dengan hal tersebut upah minimum provinsi tidak berhubungan langsung terhadap produk domestik regional bruto karena dalam kenyataannya hubungan upah minimum provinsi terhadap produk domestik regional bruto melewati berbagai tahap-tahap seperti jumlah penyerapan tenaga ,angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Semakin tinggi upah yang dibayar kepada pekerja maka akan menyebabkan penurunan penyerapan pekerja yang digunakan sehingga menyebabkan output produksi akan berkurang sehingga mengakibatkan penurunan nilai PDRB suatu daerah.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan statistic deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan pengaruh variabel-variabel yang dipilih melalui pengujian hipotesis. Adapun variabel-variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu PDRB (Y) dan variabel independen yaitu investasi (X1), inflasi (X2), upah minimum provinsi (X3).

Populasi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah enam provinsi yang berada di pulau Sulawesi yaitu provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Sedangkan sampel yang digunakan adalah investasi dalam negeri, inflasi dalam satuan persen, upah minimum provinsi dan PDRB ADHK di tiap – tiap provinsi di pulau Sulawesi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis *time series* dari tahun 2010-2019 dan data *cross section* di enam provinsi di pulau Sulawesi. Hasil dari gabungan data tersebut menghasilkan 60 observasi.

Metode analisis yang digunakan adalah *pooling* data atau juga disebut dengan data panel, yang gabungan data antara *cross section* dan *time series*. Untuk menganalisis dari setiap variabel, berikut ini model untuk analisis regresi data panel dalam penelitian ini.

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 I_{it} + \beta_2 LNIF_{it} + \beta_3 LNUMP_{it} + e_{it}$$

Keterangan

β_1 = Koefisien untuk variabel Investasi

β_2 = Koefisien untuk variabel inflasi

βUMP = Koefisien untuk variabel UMP

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

LN = Log Natural

i = Subjek

t = Periode waktu

e = Error

Model menggunakan Logaritma Natural yang berfungsi untuk mengubah data yang awalnya berdistribusi menceng (tidak normal) menjadi normal (Gujarati dan Porter, 2012). Selanjutnya dilakukan uji hipotesis berupa uji koefisien determinasi (R-square), uji koefisien regresi secara simultan (Uji-F), dan uji koefisien regresi secara parsial (Uji T).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis data panel yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel investasi, inflasi dan upah minimum provinsi terhadap produk domestik regional bruto di pulau Sulawesi periode 2010-2019 dengan menggunakan menggunakan model *fixed effect*. Berikut ini adalah hasil estimasi menggunakan model *fixed effect*.

Dependent Variable: PDRB?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 06/01/20 Time: 20:47				
Sample: 2010 2019				
Included observations: 10				
Cross-sections included: 6				
Total pool (balanced) observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IV?	0.058445	0.04062	1.438827	0.1563
LOGIF?	-0.4211	0.197447	-2.13274	0.0378
LOGUMP?	0.22159	0.399609	0.554516	0.5816
Fixed Effects (Cross)				
_SU—C	-0.0865			
_SS—C	1.227473			
_SB—C	-0.34156			
_STR—C	0.00886			
_ST—C	0.220849			
_G—C	-1.02912			

	Effects Specification		
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.521199	Mean dependent var	11.08632
Adjusted R-squared	0.446093	S.D. dependent var	1.169566
S.E. of regression	0.870449	Akaike info criterion	2.697866
Sum squared resid	38.64176	Schwarz criterion	3.012018
Log likelihood	-71.936	Hannan-Quinn criter.	2.820748
F-statistic	6.9395	Durbin-Watson stat	1.507061
Prob(F-statistic)	0.000004		

Sumber : Penulis, 2020

Dari hasil dari persamaan data panel dapat menjelaskan bahwa pengaruh dari setiap variabel-variabel bebas yaitu Investasi (IV), Inflasi (IF), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap variabel terikat yaitu Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = 8.058689 + 0.058445\text{IV} - 0.421104\text{IF} + 0.22159\text{UMP}$$

Hasil dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Investasi (IV)

Pada variabel investasi dalam penelitian ini memiliki koefisien positif yaitu sebesar 0.058445 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1% pada variabel terikat yaitu investasi, maka akan menaikkan produk domestic regional bruto sebesar 0.058445%

b) Inflasi (IF)

Pada variabel inflasi dalam penelitian ini memiliki koefisien negative yaitu sebesar -0.421104 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1% pada variabel terikat yaitu inflasi, maka menyebabkan penurunan nilai produk domestic regional bruto sebesar 0.421104%

c) Upah Minimum Provinsi (UMP)

Pada variabel UMP dalam penelitian ini memiliki koefisien positif yaitu sebesar 0.22159 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1% pada variabel terikat yaitu UMP, maka menyebabkan menaikkan nilai produk domestic regional bruto sebesar 0.22159%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji white, pengambilan keputusan dengan melihat $obs \cdot R^2$ dan nilai chi square yang ketika nilai chi square $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.391460	Prob. F(9,50)	0.9336
Obs*R-squared	3.949473	Prob. Chi-Square(9)	0.9147
Scaled explained SS	51.39278	Prob. Chi-Square(9)	0.0000

Sumber : Hasil Olah Eviews 9.

Dengan melihat nilai Prob chi square ($0.914 > 0.05$) maka kesimpulan dari uji heteroskedastisitas ini adalah tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Pada data time series masalah autokorelasi sering terjadi sehingga diperlukan uji autokorelasi guna untuk mengetahui kesalahan pengganggu pada periode waktu (T) terhadap periode waktu sebelumnya (t-1). Berikut ini adalah hasil dari uji autokorelasi dengan menggunakan uji LM test.

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.047823	Prob. F(2,54)	0.9533
Obs*R-squared	0.106086	Prob. Chi-Square(2)	0.9483

Sumber : Hasil Olah Eviews 9.

Melihat nilai $obs \cdot R^2 >$ dari nilai Prob chi square ($0.9483 > 0.05$) sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolerasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antara variabel independen (investasi, inflasi dan upah minimum) terhadap independen lainnya. Dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil analisis data. Jika $VIF > 10$ maka terjadi persoalan multikolinearitas antara variabel

bebas lainnya. Sedangkan jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas lainnya.

Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 04/29/20 Time: 21:39
Sample: 1 60
Included observations: 60

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
IFLIT	5.11E+12	6.576038	1.150607
IIT	552530.7	2.199632	1.281916
UMPIT	1.65E+13	1880.936	1.422907
C	3.41E+15	1914.283	NA

Sumber : Hasil Olah Eviews 9.

Dari hasil di atas dapat dilihat centered VIF untuk variabel inflasi investasi dan upah minimum < 10 sehingga dari uji multikolinearitas tidak terdapat gejala multikolinearitas dari variabel bebas lainnya

Uji Signifikansi

Uji T

- Secara parsial variabel investasi berpengaruh positif ditandai dengan melihat nilai t hitung yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel terikat (PDRB) karena nilai signifikansi Investasi sebesar 0.1563 (lebih besar dari alpha 5% atau 0,05).
- Varabel Inflasi secara parsial atau individu berpengaruh negative dengan melihat nilai t hitung dan nilai signifikansi Inflasi sebesar 0.0378 (lebih kecil dari alpha yaitu 5% atau 0,05), hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel Produk Domestik Regional Bruto.
- Variabel Upah Minimum Provinsi secara parsial atau individu berpengaruh positif dengan melihat nilai t hitung, dan secara signifikansi nilai signifikansi Upah Minimum Provinsi yaitu 0.5816 ($0.5816 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan secara parsial atau individu variabel Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Produk Domestik Regional Bruto.

Uji F

Selanjutnya dalam penelitian dilakukan uji f, dapat dilihat dari tabel di atas bahwa nilai probabilitas f-statistik sebesar 0.000004 atau lebih kecil dari alpa (0.05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yakni investasi, inflasi dan upah

minimum provinsi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yakni PDRB di pulau Sulawesi tahun 2010-2019.

Uji Determinasi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-square*) dalam penelitian sebesar 0,446093 yang berarti variabel bebas yaitu investasi, inflasi dan upah minimum provinsi dalam menjelaskan variabel terikat yaitu PDRB di pulau Sulawesi sebesar 44% sedangkan sisanya 56% dijelaskan di luar variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Implikasi Hasil Penelitian

1. Investasi Terhadap PDRB

Dari hasil penelitian menghasilkan investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB di pulau Sulawesi. Hal tersebut disebabkan karena pada kenyataannya investasi di pulau Sulawesi tidak tersebar secara merata terdapat di salah satu provinsi yaitu di provinsi Sulawesi Selatan saja sehingga terjadi ketimpangan baik dari segi infrastruktur, penyerapan tenaga kerja SDM yang memumpuni dan fasilitas yang terdapat di provinsi tersebut lebih memadai daripada provinsi lain. Alasan lainnya adalah karena investasi di pulau Sulawesi bersifat fluktuatif yang menandakan bahwa kurangnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di provinsi lain akibat dari ketidak meratanya penyebaran investasi tersebut. Dalam penelitian ini tidak memasukkan penanaman modal asing yang pada kenyataannya dari segi jumlah proyek dan nilai investasi lebih besar dibandingkan penanaman modal dalam negeri. Minimnya investasi di bidang infrastruktur terutama bidang transportasi karena ketika sarana transportasi yang mendukung akan menekan biaya distribusi sehingga menyebabkan perekonomian menjadi efektif dan efisien. Faktor alam juga tidak dapat dihindari karena keadaan cuaca yang tidak mendukung dapat menyebabkan konstruksi yang diperkirakan meningkat justru tumbuh dengan terbatas.

2. Inflasi Terhadap PDRB

Dari hasil penelitian menghasilkan inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap PDRB di pulau Sulawesi. Hal tersebut disebabkan karena inflasi di pulau Sulawesi meskipun dapat dikategorikan rendah, namun inflasi tersebut melampaui inflasi nasional dengan inflasi tertinggi pada tahun 2014. Laju inflasi rendah dapat dikatakan lebih baik karena dengan laju inflasi rendah tersebut maka dapat menjaga kestabilan ekonomi (Sukirno, 2003). Inflasi yang melampaui nasional di pulau Sulawesi meningkatnya konsumsi masyarakat di pulau Sulawesi diakibatkan karena terjadinya kelangkaan barang atau jasa sehingga memicu inflasi. Dan juga terjadi peningkatan konsumsi masyarakat di pulau Sulawesi yang melambangkan bahwa kondisi perekonomian membaik dan tingkat kepercayaan rumah tangga

terhadap produsen meningkat. Namun dengan peningkatan konsumsi tersebut menyebabkan kelangkaan barang dan jasa sehingga menimbulkan inflasi.

3. Upah Minimum Provinsi Terhadap PDRB

Dari hasil penelitian ini menghasilkan bahwa UMP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Hal tersebut disebabkan karena Dalam kenyataannya upah tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan PDRB karena dengan peningkatan upah minimum perusahaan akan bersifat rasional dengan melakukan efisiensi tenaga kerja sehingga menimbulkan PHK dan akan berdampak pada PDRB. Meskipun besaran upah minimum telah ditetapkan, namun dalam kenyataannya masih banyak sejumlah perusahaan atau pelaku bisnis yang membayar tenaga kerja di bawah upah minimum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan akibat dari ketidak mampuan perusahaan dalam membayar upah tersebut dan jika dipaksa maka akan mengakibatkan penutupan perusahaan (lock out). Hal tersebut sesuai dengan teori permintaan tenaga kerja klasik yang menyebutkan bahwa upah berpengaruh langsung terhadap permintaan tenaga kerja. Semakin tinggi upah yang diberikan maka perusahaan akan mengurangi tenaga kerja yang digunakan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis regresi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Inflasi di pulau Sulawesi diakibatkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat yang juga sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produsen. Namun dengan peningkatan konsumsi tersebut menyebabkan kelangkaan barang dan jasa sehingga menimbulkan inflasi. Namun berdasarkan jenis inflasi, inflasi yang terjadi di pulau Sulawesi masih tergolong rendah sehingga pemerintah provinsi masih dapat mengontrol perekonomian.
2. Investasi dalam negeri yang terjadi di pulau Sulawesi bersifat terpusat di provinsi Sulawesi Selatan dan juga investasi di pulau Sulawesi bersifat fluktuatif yang mempengaruhi tingkat kepercayaan investor. Hal tersebut disebabkan karena ketersediaan fasilitas, infrastruktur terutama di bidang transportasi, kualitas sumber daya manusia di provinsi tersebut lebih baik dibandingkan di provinsi lainnya sehingga mengakibatkan tidak meratanya pembangunan ekonomi di pulau Sulawesi. Peningkatan investasi di bidang transportasi akan menekan biaya distribusi sehingga menyebabkan perekonomian menjadi efektif dan efisien. Jumlah proyek dan nilai investasi dalam negeri di pulau Sulawesi juga masih di bawah penanaman modal asing.

3. Peningkatan upah yang terjadi mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar tenaga kerja yang digunakan sehingga dengan peningkatan upah maka perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja yang digunakan dengan cara putus hubungan kerja dan hal tersebut sesuai dengan teori permintaan tenaga kerja klasik. Dengan mempekerjakan tenaga kerja yang mempunyai skill dan keterampilan yang tinggi dan upah yang sesuai sehingga walaupun terjadi putus hubungan kerja, perusahaan masih tergolong produktif karena menggunakan tenaga kerja yang ahli dengan keterampilan tinggi. Peningkatan upah yang terjadi juga menyebabkan peningkatan konsumsi masyarakat yang merupakan sinyal positif bagi daerah dan juga merupakan efek dari peningkatan upah yang diberlakukan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah provinsi dapat meningkatkan potensi daerah yang dimiliki sehingga menarik para investor untuk menanamkan modalnya di provinsi tersebut dan juga agar investasi tidak terpusat di satu provinsi saja. Untuk meningkatkan kemandirian pemerintah provinsi, sebaiknya tidak bergantung pada investasi asing sehingga ketika terjadi penurunan kepercayaan maka dapat mengandalkan investasi dalam negeri. Peningkatan investasi di tiap provinsi dapat dilakukan dengan cara memperbaiki infrastruktur yang kurang baik terutama bidang transportasi sehingga dapat mengefisienkan perekonomian.
2. Harapannya pemerintah provinsi dapat menjaga kestabilan harga dan dapat menjamin ketersediaan barang dan jasa sehingga ketika terjadi peningkatan konsumsi oleh masyarakat maka tidak menimbulkan inflasi yang berdampak pada perekonomian daerah.
3. Harapannya dengan peningkatan upah minimum pemerintah dapat lebih memperhatikan masyarakat yang terkena imbas dari PHK yaitu dengan cara mengontrol kenaikan harga barang yang terjadi di pasar. Harapan selanjutnya dalam penetapan upah adalah sebaiknya dengan meningkatnya upah diikuti juga dengan peningkatan skill para pekerja sehingga antara pekerja dan perusahaan saling menguntungkan.
4. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penambahan variabel penyerapan tenaga kerja karena pada penelitian ini upah tidak berpengaruh langsung terhadap kenaikan PDRB. Dan juga perlu dilakukan penambahan variabel penanaman modal asing karena mayoritas investasi di pulau Sulawesi sebagian besar adalah penanaman modal asing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2020). https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik diakses pada 7 Januari 2020
- Badan Pusat Statistik. 2018. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi 2006-2017. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2019. Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah) Harga Konstan 2010-2018. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2017). Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dan rata-rata Nasional per tahun (Dalam Rupiah), 1997-2016 <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917> diakses pada 8 Januari 2020.
- Badan Pusat Statistik. (2019). PDRB Tahunan Sulawesi Selatan <https://sulsel.bps.go.id/statictable/2019/07/04/162/pdrb-tahunan-Sulawesi-Selatan-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-2010-2018-miliar-rupiah.html> diakses pada 14 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. (2019). Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2010-2019 <https://sultra.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2019). Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2010-2019 <https://sultra.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto.html#subjekViewTab3> diakses pada 2 februari 2020
- Badan Pusat Statistic Provinsi Sulawesi Barat. (2019). Kondisi Inflasi Kota Mamuju Menurut Bulan 2010-2019. <https://sulbar.bps.go.id/subject/3/html> diakses pada 22 februari 2020
- Badan Pusat Statistic Provinsi Sulawesi Selatan. (2019). Inflasi Sulawesi Selatan Dan Beberapa Kota Tahun 2010-2018. <https://sulsel.bps.go.id/subject/3/inflasi.html> diakses pada 22 februari 2020

- Badan Pusat Statistic Provinsi Sulawesi Tengah. (2019). Inflasi Tahunan Sulawesi Tengah 2010-2018. <https://sulteng.bps.go.id/Subject/3/Inflasi.Html> Diakses Pada 23 Februari 2020
- Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat. (2019) Inflasi Pulau Sulawesi <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sulbar/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sulawesi-Barat-November-2019.aspx> diakses pada 24 februari 2020
- Boediono. 1981. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPF
- Gujarati, Damodar dan Porter, Dawn. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat
- Jhingan. 1996. Ekonomi pembangunan dan perencanaan. Rajawali press. Jogjakarta.
- Nurkse, Ragnar. 1964. Masalah Pembentukan Modal di Negara-Negara Yang Sedang Membangun Terjemahan Hutagalung. Jakarta: Bhatara.
- Sukirno, Sadono. 2003. Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Penerbit PT. Salemba, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2010. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- Todaro, M.P. 1981. Economic Development in The Third World, London: Longman
- Todaro, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid I, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Witjaksono, Mit. 2009. "Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan". JESP, Vol.1, No. 1